

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Ibrahim, 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Aminudin, 2007. *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*. Semarang: Kanisius.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981. *Seri Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Depdiknas, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Budiarjo, 1998. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H.A.W. Widjaja, 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara Cet. 6*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendrawan, 2004. *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri, 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- I Made Arya Utama, 2008. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Sutra.
- M. Laica Marzuki, 2012. *Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Buku Kesatu.

- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'Matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta.
- Ni' Matul Huda, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Viktor A Thompson, 1961. *Modern Organization*, New York: Alfred A. Knoff.
- Zulfie Syarief, 2000. *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Medan: USU Press.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan.

## **Jurnal**

Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal *Academica Fisip Untad*, Volume 3, Nomor 1, (Februari 2011).

Abdul Halik, "Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU)", Jurnal *Bina Praja*, Volume 6, Nomor 1 (Maret 2014).

Andi Pontjono Wiyono, "Tanggung Jawab Developer Perumahan Terhadap Penyediaan Tempat Pemakaman", e- Jurnal *The Spirit Of Law* Volume 1, Nomor 1, ( Maret 2015).

Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, (Januari-Maret 2014).

Junidis, "Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau", *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 4, (2015).

Muhammad Mujtab Habibi, "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 28, Nomor 2, (Agustus 2015).

Nia Kurniati, "Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, (2014).

Redaksi Jurnal, "Presiden Ingatkan Pentingnya Percepatan Proses Perizinan Untuk Perumahan", (Agustus 2017).

Sakina Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, (2013).

Sani, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan IMB di Kota Pontianak", *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3, (Oktober 2012).